

## BAB V

### KESIMPULAN

Kesimpulan yang dipaparkan dalam bab ini merujuk pada jawaban atas permasalahan penelitian yang telah dikaji oleh penulis di dalam bab sebelumnya. Terdapat beberapa hal yang penulis simpulkan berdasarkan permasalahan yang dibahas, yaitu:

Latar belakang didirikannya Bank Indonesia pada tahun 1953 tidak lepas dari gambaran kehidupan politik di Indonesia pada saat itu. sebenarnya banyak faktor yang mempengaruhi didirikannya Bank Indonesia. Faktor yang paling mempengaruhi ialah faktor politik dan ekonomi. Dari segi politik, salah satu yang paling penting yang menjadi faktor penyebab pendirian Bank Indonesia ialah keinginan masyarakat Indonesia untuk merdeka secara seutuhnya.

Sejak dideklarasikannya kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 status Indonesia berubah menjadi negara merdeka. Hanya saja Indonesia belum merdeka sepenuhnya karena Belanda belum mau mengakui kemerdekaan Indonesia. Oleh karena itu perlu dilakukannya perundingan. Salah satu perundingan yang dilakukan untuk memerdekakan Indonesia sepenuhnya ialah Konferensi Meja Bundar pada tahun 1949 di Den Haag, Belanda. Sehingga pada tanggal 27 Desember 1949, Indonesia sah menjadi negara yang merdeka secara *de facto* dan *de jure*. Konferensi ini menetapkan *De Javasche Bank* sebagai bank sentral Indonesia.

Sebelum dinasionalisasikannya *De Javasche Bank* menjadi Bank Indonesia, sebenarnya pemerintah Indonesia telah mendirikan sebuah bank yang pada awalnya akan ditugasi sebagai bank sentral Indonesia. Bank tersebut ialah Bank Negara Indonesia 46 (BNI 46) yang didirikan tahun 1946 sebagai peleburan dari Jajasan Poesat Bank Indonesia yang didirikan tahun 1945. Namun karena adanya keputusan hasil KMB, BNI 46 dijadikan sebagai bank pembangunan Indonesia. Didirikannya lembaga-lembaga keuangan ini ialah lebih ditujukan untuk mengatur perekonomian negara Indonesia yang saat itu baru merdeka.

Dari segi ekonomi, latar belakang pendirian Bank Indonesia dapat dilihat dari situasi ekonomi Indonesia pasca kemerdekaan yang mengalami kekacauan akibat dari perjuangan fisik yang dilakukan untuk melawan penjajah. Pengaturan ekonomi sangat diperlukan pada saat itu karena Indonesia baru merdeka sehingga harus dapat mengatur ekonominya sendiri. Oleh karena itu diperlukan sebuah lembaga keuangan pusat atau bank sentral untuk mengaturnya. Pengaturan ekonomi lebih ditujukan pada perehabilitasian infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat. Dengan dijadikannya Bank Indonesia sebagai Bank sentral maka menuntut Bank Indonesia untuk melakukan tugasnya secara maksimal dalam mengatasi krisis ekonomi Indonesia.

Perkembangan Bank Indonesia sejak berdirinya pada tahun 1953 sampai tahun 1966 dapat dilihat dari berbagai aspek diantaranya yaitu perkembangan awal Bank Indonesia dan fungsi serta tugas Bank Indonesia. Perkembangan awal Bank Indonesia dapat dikaji melalui dua aspek yaitu dengan melihat permasalahan modal awal Bank Indonesia dan struktur organisasi Bank Indonesia. Permasalahan

awal yang timbul sejak awal berdirinya Bank Indonesia ialah mengenai permodalan Bank Indonesia karena Bank Indonesia merupakan hasil penasionalisasian *De Javasche Bank* milik Belanda oleh karena itu saham-saham yang ada didalamnya pun milik Belanda. Untuk mengatasi hal tersebut pemerintah Indonesia melakukan pembelian saham-saham *De Javasche Bank* kepada pihak Belanda sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hasil dari pembelian saham tersebut dijadikan sebagai modal awal bagi Bank Indonesia dalam menjalankan tugasnya,

Struktur organisasi dalam Bank Indonesia sejak awal berdirinya sampai pada perkembangannya selalu mengalami perubahan. Perubahan-perubahan yang dilakukan itu dipengaruhi oleh situasi politik dan ekonomi yang terjadi di dalam negeri. Sejak tahun 1953 sampai tahun 1966, Bank Indonesia pernah melakukan perubahan struktur organisasi selama empat kali. Bank Indonesia dipimpin oleh seorang Gubernur. Gubernur pertama Bank Indonesia ialah Mr. Sjafruddin Prawiranegara. Selama dua periode yaitu Demokrasi Liberal dan Demokrasi terpimpin, Gubernur Bank Indonesia berganti sebanyak lima kali yaitu Mr. Sjafruddin Prawiranegara (1953-1958), Mr. Loekman Hakim (1958-1959), Mr. Soetikno Slamet (1959-1960), Mr. Soemarno (1960-1963) dan Teuku Jusuf Muda (1963-1966).

Perubahan struktur organisasi yang paling penting ialah pada masa Gubernur Teuku Jusuf Muda. Pada masa ini Gubernur Bank Indonesia dijadikan juga sebagai menteri dalam kabinet yaitu sebagai Menteri Urusan Bank Sentral. Di dalam struktur organisasi Bank Indonesia terdapat struktur kepemimpinan

paling utama sebagai pendamping gubernur diantaranya adalah Dewan Moneter, Direksi Bank Indonesia, Dewan Penasehat. Kesemuanya itu memiliki tugas-tugas yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Pokok Bank Indonesia Tahun 1953.

Fungsi dan tugas dari Bank Indonesia ditentukan pula oleh Undang-Undang Pokok Bank Indonesia Tahun 1953. Tugas dan fungsi utama dari Bank Indonesia sebenarnya mencakup tiga fungsi tradisional suatu bank sentral, yaitu fungsi kebijakan moneter, kebijakan perbankan, dan kebijakan sistem pembayaran. Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia merupakan hasil kesepakatan antara Departemen Keuangan dan pemerintah yang lebih ditujukan untuk mengatasi krisis ekonomi Indonesia .

Kondisi Perekonomian Indonesia Tahun 1953-1966 tepatnya pasca didirikannya Bank Indonesia sebagai bank sentral belum mengalami kestabilan. Penggambaran kondisi perekonomian ini lebih ditujukan untuk mengetahui kondisi perekonomian Indonesia pasca didirikannya bank sentral di Indonesia guna mengatur kehidupan ekonomi Indonesia. Namun pada intinya, pendirian Bank Indonesia sendiri tidak terlalu memberikan dampak yang positif bagi perekonomian Indonesia. Hal ini dapat terlihat bahwa sejak tahun 1953 sampai tahun 1966 kondisi perekonomian Indonesia masih kurang stabil walaupun terdapat beberapa tahun yang mengalami perkembangan atau kenaikan. Tidak stabilnya perekonomian Indonesia dapat dilihat dari tingginya nilai inflasi dan defisit hampir di setiap tahun dan setiap masa pemerintahan. Ketidakstabilan ini dipicu oleh peristiwa-peristiwa politik yang terjadi diantara tahun ini, seperti peristiwa pemberontakan di berbagai daerah yaitu pemberontakan

PRRI/PERMESTA, masalah Irian Barat, APRA, RMS, Bandung Lautan Api, Medan Area sampai pada peristiwa puncaknya yaitu G 30 S/PKI 1965 yang kesemuanya menelan biaya yang tidak sedikit.

Kedudukan Bank Indonesia dalam kehidupan ekonomi Indonesia Tahun 1953-1966 dapat dilihat dari status Bank Indonesia yang ditetapkan sebagai bank sentral bagi Indonesia. Kedudukan Bank Indonesia sebagai bank sentral menjadikan Bank Indonesia sebagai pengendali perekonomian Indonesia. Kedudukan tersebut berhubungan langsung dengan peran Bank Indonesia. Peran Bank Indonesia dalam perekonomian Indonesia harus dilihat dari berbagai sudut pandang diantaranya dari kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan. Kebijakan moneter yang dikeluarkan melalui pembatasan kredit, pembatasan jumlah uang beredar, sanering, devaluasi mata uang dan kebijakan ekspor-impor yang kesemuanya diharapkan mampu untuk mengatasi permasalahan ekonomi Indonesia.

Kebijakan moneter dan kebijakan ekspor-impor yang dikeluarkan tidak lantas dapat mengatasi krisis ekonomi yang dihadapi Indonesia. Hal ini disebabkan oleh tidakstabilnya kondisi politik Indonesia yang lebih diperhatikan oleh pemerintah. Kebijakan-kebijakan moneter tersebut hanya mampu dikeluarkan dan dilaksanakan oleh Bank Indonesia walaupun hasilnya kurang terlihat secara nyata dan maksimal. Peningkatan ekonomi hanya terjadi pada tahun-tahun tertentu saja dan tidak berlangsung lama sehingga sejak tahun 1953-1966 kondisi perekonomian Indonesia terus menerus mengalami ketidakstabilan.